



Dinkes
KOTA BLITAR

×

LKj IP 2025

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

×



×

Dinas Kesehatan Kota Blitar 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun 2025 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dengan berupaya mewujudkan Misi ke-2 Pembangunan Kota Blitar yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Blitar, Februari 2026



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI

Pembina

NIP 197507212006042016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis 2021 – 2026 adalah **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2021 – 2026, **“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”** dan **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**.

Perumusan keberhasilan pencapaian kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) indikator sasaran yang merupakan Indikator Sasaran 1 dan 1 (satu) indikator Sasaran lainnya, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus dicapai setiap tahunnya selama periode Renstra.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Prevalensi Balita Stunting;
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi;
6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
8. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar;

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan 4 (empat) program upaya strategis dan 1 (satu) program pendukung/Administrasi Umum, meliputi:

Program Upaya Strategis:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Pendukung (Administrasi Umum):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan Walikota demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga ke depan akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2025 oleh masing-masing bidang, sekretariat dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	200%	641.374.156,00	637.269.757,00	99,36%
Angka Kematian Bayi (AKB)	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	127,43%	162.964.000,00	158.565.845,00	97,30%
Prevalensi balita stunting	6,87%	6,18%	110,11%	1.382.532.700,00	1.317.280.424,00	95,28%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	37,66%	113,59%	48.539.824.127,00	46.640.069.109,83	96,09%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	85,71%	100,84%	9.532.578.110,00	9.265.087.055,00	97,19%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 (indeks)	90,30 (indeks)	104,06%			
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,81 (skala)	0,85 (skala)	104,94%	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00	95,81%

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18%	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,26%
Total				140.695.603.130,00	137.498.202.845,83	97,73%

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **97,73%** dengan realisasi **Rp. 137.498.202.845,83** dikategorikan "**sangat berhasil**".

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 dengan nilai rata-rata capaian kinerja **120,02%** atau "**sangat berhasil**" dan masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-aspek Strategis	8
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	22
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025	45
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	48
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)	48
B. Akuntabilitas Keuangan (<i>Cost Per Outcome</i>)	50
1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	62
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
C. Prestasi/Penghargaan	68
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Langkah Perbaikan	72

Lampiran-Lampiran

- A. Matriks Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- E. Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2025	8
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2025	9
Tabel 1.4	Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 – 2025	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025	25
Tabel 3.2	Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2021 – 2025	29
Tabel 3.3	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Kota Blitar Tahun 2025	35
Tabel 3.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sesuai Unsur Tahun 2025	38
Tabel 3.5	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2025	39
Tabel 3.6	Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021 – 2025	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025	46
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	48
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur	49
Tabel 3.10	Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025	51
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025	51
Tabel 3.12	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	63
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Anggaran	68
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2025 ...	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar 2021-2026, yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan, khususnya misi ke-2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas

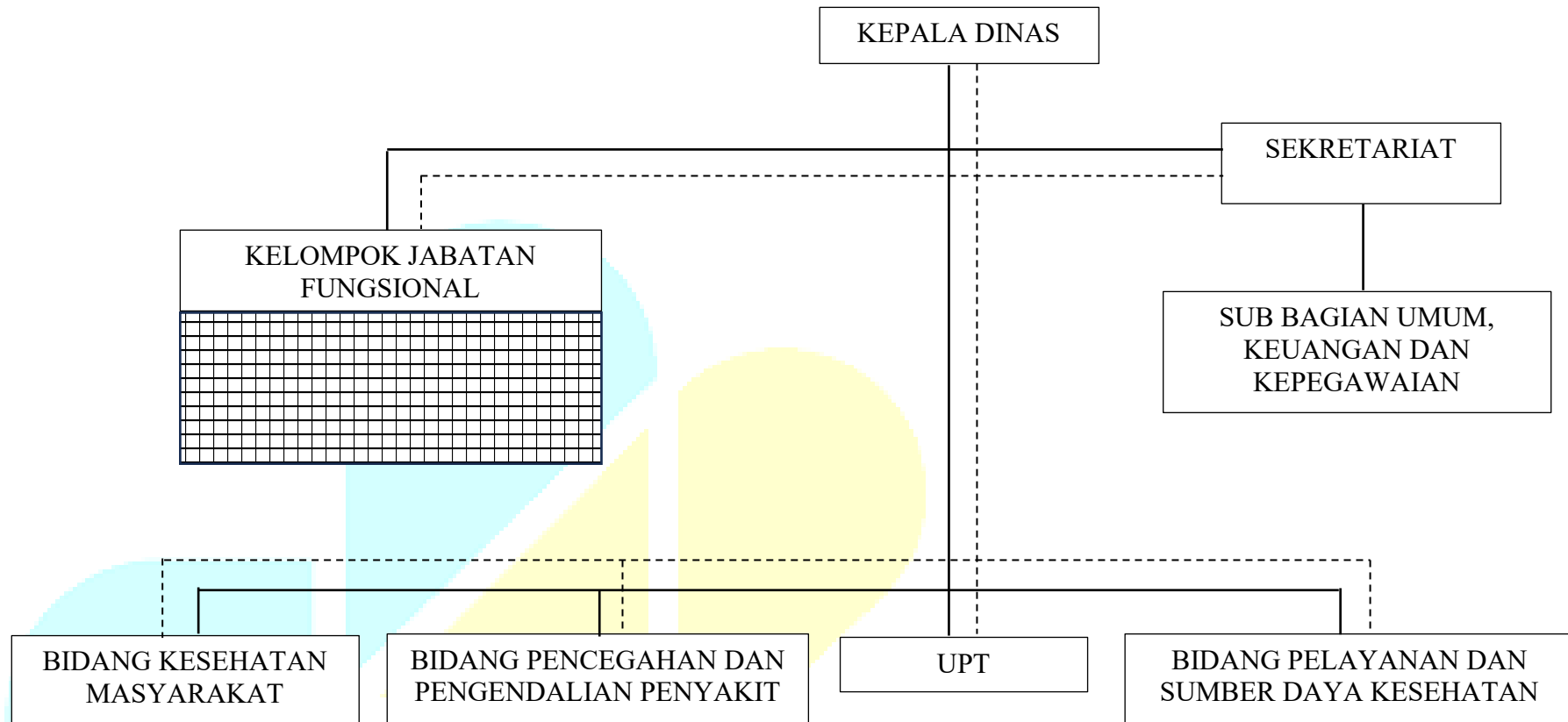
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output* dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;

- k. pengendalian penyakit, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- s. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- t. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- u. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 372 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	0
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Pejabat Fungsional	256
6.	Staf/Fungsional Umum	32
5.	TPL	78
Jumlah		372

Tabel 1.2 Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	30
2.	Golongan III	161
3.	Golongan II	34
4.	Golongan I	0
6.	PPPK	69
5.	TPL	78
Jumlah		372

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPT dibawahnya, yaitu UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di:

Kantor utama yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar.

b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang terletak di:

- 1) UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178;
- 2) UPT Puskesmas Sukorejo, Jalan Cemara No.163;
- 3) UPT Puskesmas Sananwetan, Jalan Jawa No.07,
- 4) UPT Labkesda, Jalan Ciliwung No.180;

Sedangkan jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2025

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/ POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit				
	Rumah Sakit Umum	1		4	5
	Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	Puskesmas Rawat Inap	0			0
	Puskesmas Non Rawat Inap	3			3
	Puskesmas Pembantu	17			17
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	Balai pengobatan/klinik		2	25	27
	Praktik Dokter Umum Perorangan			55	55

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/ POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
	Praktik Dokter Gigi Perorangan			29	29
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan			27	27
	Praktik Pengobatan Tradisional			203	203
	Unit Tranfusi Daerah			2	2
4.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
	Apotek	1		58	59
	Toko Obat			5	5

Sumber : Data Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

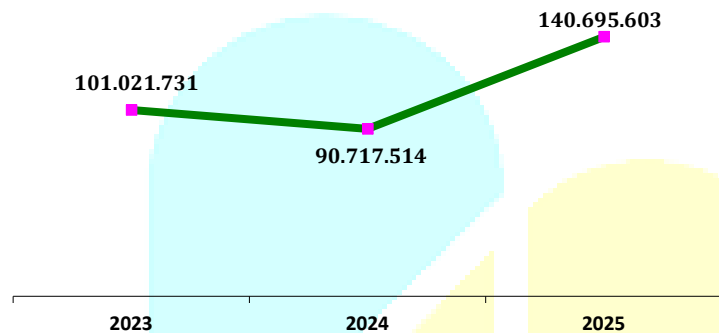
Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 – 2025

No.	Uraian	Jumlah Anggaran		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah:			
	Dinas Kesehatan	93.901.357.444,00	86.247.427.226,00	134.527.380.735,00
	UPT PKM Kepanjenkidul	2.978.287.346,00	1.369.810.369,00	2.001.908.256,00
	UPT PKM Sukorejo	2.899.332.589,00	1.528.181.182,00	2.001.983.912,00
	UPT PKM Sananwetan	3.242.451.678,00	1.572.095.549,00	2.164.330.227,00
	Jumlah Anggaran	101.021.731.210,00	90.717.514.326,00	140.695.603.130,00

Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.1 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2025 (dalam ribuan).



Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kota Blitar bersumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-Kes (Dana Alokasi Khusus Kesehatan), DAK Non-Fisik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOK), BOK-BPOM, DBHPR (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Penerimaan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan penerimaan APBD Tahun 2024 antara lain:

1. BK Provinsi Jawa Timur sebesar 76.000.000 dari tahun sebelumnya yang tidak menerima. Dana BK tersebut digunakan untuk program “SAJADAH” dari program prioritas Gubernur Jawa Timur.
2. Penerimaan DAK Non-Fisik (BOK) menurun 2,82% karena menu yang diusulkan tidak disetujui Kemenkes.
3. BOK-BPOM menurun 42% karena penerimaan berfokus pada pelaksanaan kegiatan Kesehatan lingkungan, pengelolaan farmasi tidak didanai lagi.

4. DAK Fisik Kesehatan beralih dari Pembangunan PSC (*Public Savety Center*) menjadi pengadaan *cold chain* dan menurun 95,57%.
5. DAU meningkat 139% karena penambahan anggaran untuk belanja pegawai RSUD Mardi Waluyo.
6. DBHCHT menurun 12,54% dan DBHPR meningkat 24,76% karena dipengaruhi penerimaan pajak atas tembakau dan rokok.
7. JKN-FKTP meningkat 1,37% karena kenaikan jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

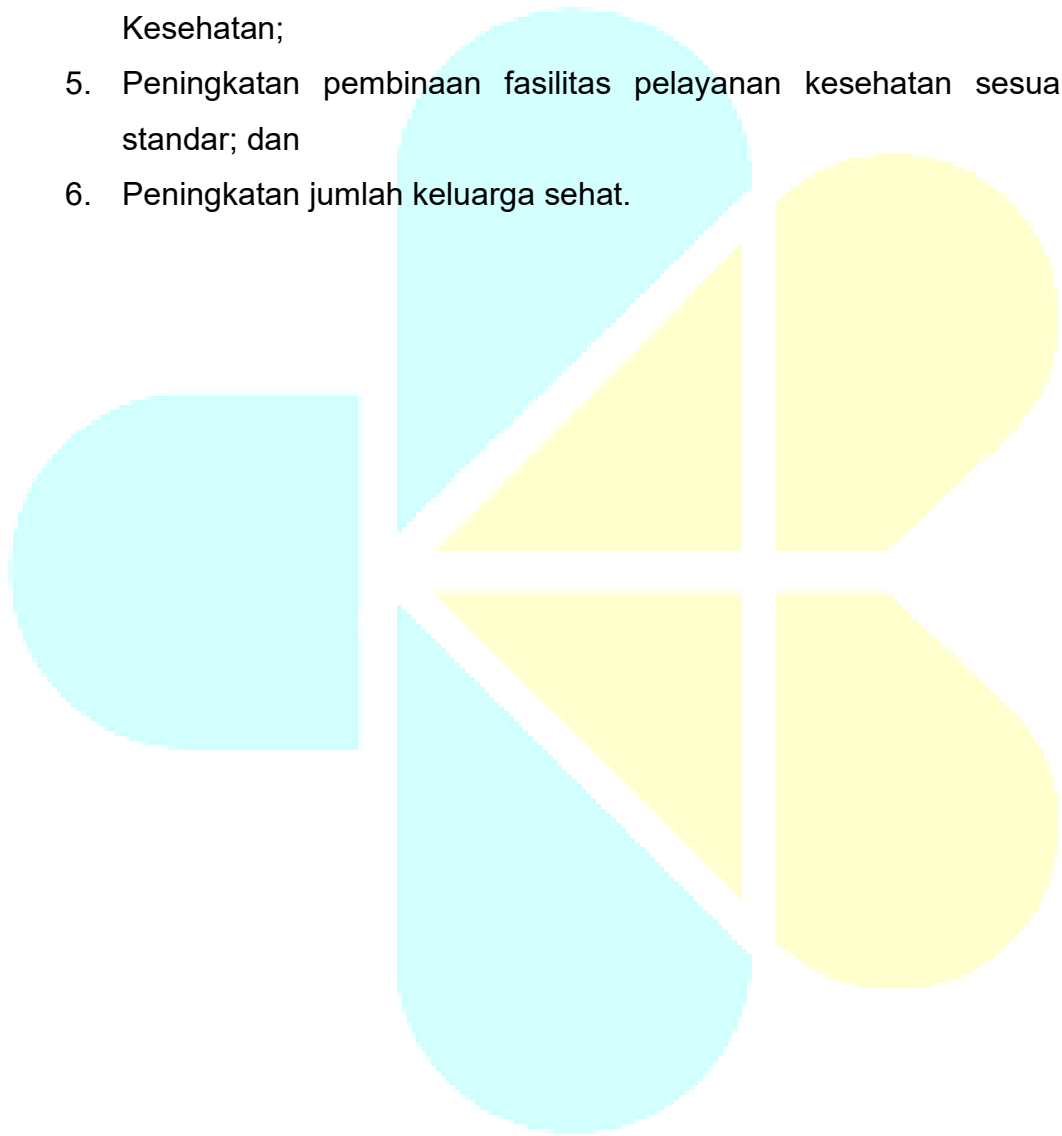
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian bayi sebanyak 8 bayi;
2. Masih adanya balita stunting sebanyak 434 balita;
3. Masih ada 111 fasyankes yang belum terkoneksi dengan Rekam Medik Elektronik (RME) sehingga belum dapat dihitung capaian pelayanan kesehatannya. Jumlah fasyankes yang sudah terkoneksi dengan RME sebanyak 27 fasyankes dari 138 fasyankes yang ada.
4. Masih ada unsur pelayanan yang bernilai rendah pada Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, yaitu waktu pelayanan dan penanganan pengaduan;
5. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebanyak 28 fasyankes dari 33 fasyankes yang seharusnya terakreditasi; dan
6. Masih ada nilai unsur yang rendah pada Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar, yaitu Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur (82,29%)

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun 2025, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peningkatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
6. Peningkatan jumlah keluarga sehat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah ***“Kota Blitar KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital;
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan;
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam ***“Lampiran. 1 LKj IP 2025: Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026”***.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-2 yang telah ditetapkan dalam

RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

KINERJA SASARAN 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) 47,68 per-100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) 4,77 per-1.000 kelahiran hidup
- Prevalensi balita stunting 6,87 %
- Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 33,15 %
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 85 %
- IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar 0,81 (skala)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan 86,78 (indeks)

KINERJA SASARAN 2



Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

86,36 (Nilai)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026, serta dalam mempertanggungjawabkan kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian dari Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	IKU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Blitar	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Sekretariat	Laporan Sekretariat	

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan;
3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Tim Kerja;

Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam **"Lampiran 3 LKj IP 2025"**.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran 2 LKj IP 2025"**.

Dalam upaya pencapaian kinerja pada tahun 2025 telah mengacu pada rekomendasi atas penilaian kinerja SAKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Agar dalam menetapkan target kinerja pada dokumen perencanaan, memperhatikan dan mengacu pada target dan hasil pengukuran kinerja pada tahun sebelumnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengukuran capaian kinerja organisasi (Aplikasi A-SAKIP).
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi dengan melengkapi analisis lebih mendalam (antara lain terkait analisa faktor pendukung dan penghambat/kendala capaian kinerja, strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja) pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi, evaluasi RKPD, serta LKj IP.
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun langkah perbaikan atas rencana tindak lanjut LKj IP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut
1.	Mengurangi jumlah kematian ibu	Melaksanakan skrining penyakit jantung akan dijadikan salah satu standar yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan ibu hamil
		Melaksanakan pelatihan 25 kompetensi kader posyandu kesehatan
		Melaksanakan drill kegawatdaruratan maternal neonatal bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RS) se-Kota Blitar
		Melaksanakan koordinasi terkait pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC
		Melaksanakan Pendampingan oleh Tim Ahli (Sp. OG) ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal dan audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan
2.	Mengurangi jumlah kematian bayi	Melaksanakan refresing manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
		Melaksanakan monev Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR), monev Skrining Hipoteroik Kongenital (SHK) dan pendampingan tim ahli tetap ditingkatkan
		Melaksanakan refreshing tatakelola Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
		Rekomendasi dari Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) segera ditindaklanjuti
3.	Menurunkan prevalensi balita stunting	Gerakan aksi bergizi pada remaja

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut
		Pemberian TTD pada remaja putri
		Sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui media cetak dan elektronik
		Penyuluhan langsung tentang pencegahan stunting ke SMP dan SMA melalui UKS dan kader kesehatan remaja
4.	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	Memfasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan
5.	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Sosialisasi dan monev secara berkala terhadap regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang baru
6.	Meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Intervensi lanjutan tetap dilakukan berdasarkan capaian indikator yang belum tercapai dan yang memungkinkan untuk diintervensi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 maupun Renja Tahun 2025 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah yang didukung dengan program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 – 2026 maupun Renja Tahun 2025.

Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, serta membandingkan dengan target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

1. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	22,71
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	4,77 per 1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	127,43
	3. Prevalensi balita stunting	6,87%	5,77%	116,03
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	34,58%	104,31
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	84,85%	99,82
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 (indeks)	91,18 (indeks)	103,31
	7. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,81 (skala)	0,85 (skala)	104,94
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	8. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18

Sasaran 1 “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

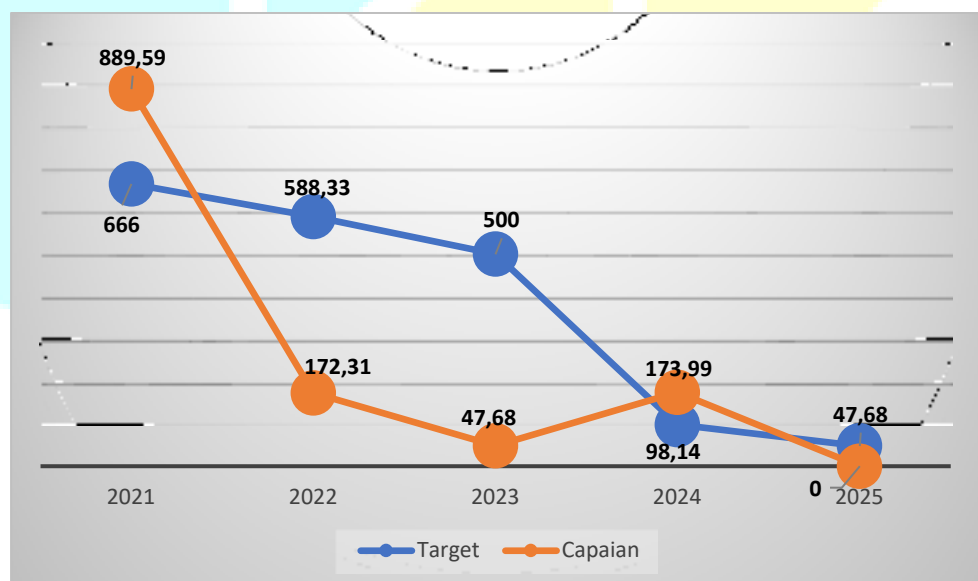
a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau

penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per 100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Tidak ada kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2025, dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 2.311 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2025 sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup memenuhi target daerah sebesar 47,68 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 200%.

Berikut merupakan grafik tren target dan capaian AKI Kota Blitar tahun 2021 – 2025:



Berdasarkan data tren di atas dapat diketahui bahwa capaian AKI Kota Blitar mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga 2023, dengan 889,59, 172,31, dan 47,68 per 100.000 KH, secara berurutan, tetapi mengalami peningkatan sebesar 126,31 pada tahun 2024 menjadi 173,99 per 100.000 KH dan menjadi 0 per 100.000 KH (tidak ada kasus kematian) pada tahun 2025. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil,

bersalin dan nifas, serta adanya keterlibatan dari lintas program dan lintas sektor.

Beberapa kegiatan yang mendukung penurunan AKI diantaranya adalah:

- kegiatan audit kasus kematian/*nearmiss* yang dilakukan secara berkala oleh tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Tingkat Kota,
- kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu nifas beresiko,
- supervisi fasilitatif dalam rangka monitoring pelayanan program KIA dan hasil pendampingan di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Blitar,
- pendampingan dokter spesialis wilayah dalam rangka penurunan AKI,
- pelaksanaan drill kegawatdaruratan maternal neonatal triwulanan di PONE/IGD masing-masing UPT Puskesmas oleh tim gadar matneo.

Dengan berbagai upaya tersebut yang berkesinambungan, diharapkan AKI Kota Blitar akan tetap pada angka 0 per 100.000 KH di tahun-tahun berikutnya.

Dalam upaya mempertahankan AKI Kota Blitar, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah melanjutkan kegiatan tahun 2025 ke tahun 2026, antara lain:

- Audit kasus kematian maternal dan perinatal (AMP-SR)
- Supervisi fasilitatif
- Kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar dalam rangka pendampingan ibu hamil dan ibu nifas beresiko
- Pendampingan tim ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas se-Kota Blitar.

- Melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan FKTP
- Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi Puskesmas dan RS dalam pencegahan dan penanganan penyebab utama kematian ibu dan bayi, sebagai bentuk upaya meningkatkan kerja sama antar jejaring/jaringan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usi 0 – 11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2025 sebanyak 8 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 2.311. Maka AKB Kota Blitar tahun 2025 sebesar 3,46 per 1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 4,77 per 1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 127,43%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena kelainan infeksi sebanyak 1 kasus, BBLR (berat badan lahir rendah) sebanyak 1 kasus, respiratory and cardiovascular disorders 3 kasus, penyakit darah dan organ pembentukan darah serta proses imun 1 kasus, kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal 1 kasus, dan 1 kasus karena other neonatal conditions. Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan sudah sesuai standar fasilitas kesehatan adalah faktor pendukung dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

Kematian pada bayi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Masih ada bayi lahir dengan BBLR, prematur, dan kelainan sistem respirasi
- Masih adanya ibu hamil resiko tinggi dan bayi resiko tinggi
- Masih ada beberapa kematian yang disebabkan faktor medis.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar antara lain:

- Melanjutkan kerjasama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan bayi Resti
- Pendampingan dokter Sp.A wilayah bagi FKTP se-Kota Blitar
- OJT Kegawatdaruratan bagi tim kegawatdaruratan FKTP ke RS
- Melanjutkan Skrining pada bayi baru lahir (SHK, HAK, G6PD, PJB dan *atresia bilier*).

c. Prevalensi balita stunting

Prevalensi balita stunting adalah persentase balita yang mengalami stunting di suatu populasi. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Jumlah balita stunting dari pengukuran balita pendek dan sangat pendek selama tahun 2025 adalah sebanyak 459 balita dari 7.433 balita Kota Blitar yang diukur. Sehingga menghasilkan angka prevalensi balita stunting sebesar 6,18% dari target 6,87% dengan capaian 110,11% yang artinya sudah mencapai target tahun 2025.

Tabel 3.2 Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

KECAMATAN		2021	2022	2023	2024	2025
KEPANJENKIDUL	Balita Diukur	2115	1863	1860	2081	1869
	Stunting	45	31	74	108	74
	%	2,13	1,66	3,98	5,19	3,96
SANANWETAN	Balita Diukur	3173	3068	3050	2953	2804
	Stunting	184	199	243	238	197
	%	5,80	6,49	7,97	8,06	7,03
SUKOREJO	Balita Diukur	2598	2488	2549	2815	2760
	Stunting	187	160	170	193	188
	%	7,20	6,43	6,67	6,86	6,81
KOTA BLITAR	Balita Diukur	7886	7419	7459	7849	7433
	Stunting	416	390	487	539	459
	%	5,28	5,26	6,53	6,87	6,18

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, ekonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Peran lintas program, lintas OPD, lintas sektor, swasta, perguruan tinggi serta lembaga masyarakat sangat penting mengingat intervensi gizi tidak hanya dilakukan oleh bidang kesehatan saja.

Strategi penting lainnya adalah memastikan intervensi sejak masa pra-kelahiran, dengan fokus pada 11 intervensi spesifik di sektor kesehatan, khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil.

Pentingnya program pengukuran lingkaran lengan dan kadar hemoglobin (Hb) pada ibu hamil, distribusi tablet tambah darah, serta suplementasi mikronutrien. Selain itu, program peningkatan mutu pengukuran di Posyandu juga terus diperkuat didukung program ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan imunisasi.

Secara keseluruhan, kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada intervensi yang dilakukan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang meliputi periode prenatal, kelahiran, dan postnatal. Dengan strategi dan intervensi yang tepat, penurunan stunting di Indonesia dapat terjadi percepatan untuk mencapai target. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan prevalensi balita stunting Kota Blitar adalah:

- Evaluasi pelaksanaan penimbangan di posyandu dengan memperhatikan alat antropometri dan kemampuan kader dalam melakukan pengukuran.
- Verifikasi ulang oleh tenaga kesehatan bila ditemukan selisih data yang tinggi
- Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas serta melakukan analisa permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan
- Monitoring dan evaluasi pencegahan stunting di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota.

d. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan di masyarakat, mempunyai peran cukup besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan upayanya, Puskesmas dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari: Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya Mini Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang mencakup penilaian kinerja UKM

essensial, UKM pengembangan, UKP, manajemen dan mutu Puskesmas.

Pelayanan di UPT Puskesmas mendukung kesetaraan dalam pelayanan. Yang mana cakupan layanan kesehatan menggambarkan keterjangkauan layanan kesehatan tersebut. Cakupan layanan kesehatan diukur melalui angka kontak setiap pasien di UPT Puskesmas yang mana dihitung menurut per-pasien. Untuk memonitor tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan di Puskesmas. Selain itu cakupan layanan di Puskesmas menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan kapitasi berbasis kinerja yang mana minimal setiap bulan puskesmas dapat mencapai cakupan layanan/angka kontak 150 permil. Cakupan pelayanan kesehatan adalah konsep yang menggambarkan seberapa besar interaksi antara layanan kesehatan dengan sasarannya. Cakupan ini mencakup seluruh proses, mulai dari alokasi sumber daya hingga pencapaian tujuan. Cakupan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan per masing-masing orang di setiap fasilitas pelayanan kesehatan setiap tahun. Sementara ini cakupan pelayanan kesehatan yang tergambar adalah cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama.

Jumlah kunjungan baru di fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam dan luar gedung sebanyak 60.895 orang terhadap 161.718 orang penduduk Kota Blitar. Jadi cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat adalah sebesar 37,66% dari target 33,15%, sehingga capaiannya sebesar 113,59%.

Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja ini adalah belum semua fasilitas kesehatan melaporkan pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan upaya tindak lanjut berupa :

- Fasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan
- Evaluasi pemakaian RME di TPMD dan klinik di Kota Blitar
- Pengembangan dashboard data di Dinkes Kota Blitar.

e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan

menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

Tujuan utama akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam pelayanan harus mengedepankan kualitas mutu pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan sesuai standar bagi masyarakat. Standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan dinilai melalui penilaian akreditasi fasyankes.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembinaan dan penilaian akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Blitar dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit, 3

Puskesmas, 20 Klinik, 2 Unit Transfusi Darah, dan 4 Laboratorium Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Kota Blitar Tahun 2025

NO	FASILITAS KESEHATAN	STATUS AKREDITASI
Rumah Sakit		
1	RSUD Mardi Waluyo	Paripurna
2	RSK Budi Rahayu	Paripurna
3	RSU Aminah	Paripurna
4	RSI Aminah	Paripurna
5	RSU Syuhada Haji	Paripurna
6	RSIA Tanjungsari	Utama
Puskesmas		
1	UPT Puskesmas Sananwetan	Paripurna
2	UPT Puskesmas Sukorejo	Paripurna
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	Paripurna
Laboratorium		
1	Labkesda Kota Blitar	Paripurna
2	Laboratorium Klinik Prodia	Paripurna
3	Laboratorium Klinik Sumber Waras	-
4	Laboratorium Klinik Ar-Rahman	-
Unit Transfusi Darah (UTD)		
1	UTD PMI Kabupaten Blitar	Paripurna
2	UTD PMI Kota Blitar	Paripurna
Klinik		
1	Klinik Pratama Siti Khodijah	Paripurna
2	Klinik Pratama Amanah	Paripurna
3	Klinik Pratama Sehat Sejahtera	Paripurna
4	Klinik Pratama Polkes 05.09.03	Paripurna
5	Klinik Pratama Polres Blitar Kota	Paripurna
6	Klinik Pratama Mediska	Paripurna
7	Klinik Utama Inoveye	Paripurna
8	Klinik Pratama Lapas Blitar	Paripurna
9	Klinik Pratama Anak Radja	Paripurna
10	Klinik Pratama dr Ivana	Paripurna
11	Klinik Pratama Rahmat Medika	Paripurna
12	Klinik Pratama Griya Ayu	Paripurna
13	Klinik Pratama Ayura	Paripurna
14	Klinik Pratama Naavagreen	Paripurna
15	Klinik Pratama Nikeisha Womencare	Paripurna
16	Klinik Pratama Moromari	Utama
17	Klinik Pratama Moza	-
18	Klinik Pratama Arre Dental Care	Paripurna
19	Klinik Pratama Beautee Glow Aesthetic	-
20	Klinik Pratama Prima	-

Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 85,71% terdiri dari 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 17 Klinik, 2 Unit Transfusi Daerah, dan 2 Laboratorium Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Capaian tersebut melebihi target indikator sebesar 85%. Terbentuknya Tim TPCB untuk melaksanakan pembinaan akreditasi kepada fasyankes adalah faktor pendukung dalam peningkatan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

Regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sering berubah, sehingga perlu dilakukan Sosialisasi dan monev secara berkala terhadap regulasi terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang baru. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengikuti penilaian akreditasi.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian fasyankes terakreditasi paripurna adalah:

- Mengingatkan proses reakreditasi kepada 4 Rumah Sakit yang akan habis masa berlaku sertifikat akreditasinya pada tahun 2026
- Melaksanakan *feedback* perencanaan perbaikan strategis (PPS) pada setiap fasyankes yang telah melaksanakan akreditasi
- Mendorong klinik dan laboratorium yang belum melaksanakan akreditasi sampai tahun 2025.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan Masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tabel 3.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sesuai Unsur Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM PER-UNSUR PELAYANAN
UPT Puskesmas Kepanjenkidul		
1	Persyaratan	86,54
2	Prosedur	87,09
3	Waktu Pelayanan	86,95
4	Biaya/Tarif	99,73
5	Produk Layanan	88,19
6	Kompetensi Pelaksana	87,64
7	Perilaku Pelaksana	94,64
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	99,18
9	Sarana dan Prasarana	86,54
	NILAI IKM	89,81
UPT Puskesmas Sukorejo		
1	Persyaratan	89,00
2	Prosedur	88,50
3	Waktu Pelayanan	87,25
4	Biaya/Tarif	97,00
5	Produk Layanan	87,75
6	Kompetensi Pelaksana	90,00

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM PER-UNSUR PELAYANAN
7	Perilaku Pelaksana	90,25
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	99,55
9	Sarana dan Prasarana	89,00
	NILAI IKM	90,02
UPT Puskesmas Sananwetan		
1	Persyaratan	89,93
2	Prosedur	91,11
3	Waktu Pelayanan	87,08
4	Biaya/Tarif	98,99
5	Produk Layanan	89,77
6	Kompetensi Pelaksana	89,26
7	Perilaku Pelaksana	91,78
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	98,66
9	Sarana dan Prasarana	90,66
	NILAI IKM	90,97

Tabel 3.5 Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	HASIL IKM
1	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	89,91
2	UPT Puskesmas Sukorejo	90,02
3	UPT Puskesmas Sananwetan	90,97
	RATA-RATA IKM	90,30

Capaian IKM sudah mencapai target, akan tetapi dari capaian IKM di UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Kepanjenkidul nilai terendah masih terkait waktu pelayanan dan di UPT Puskesmas Sananwetan terkait dengan penanganan pengaduan.

g. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam pelaksanaannya UPT Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan PIS-PK. Puskesmas Wajib Mendata Seluruh Keluarga yang ada di Wilayah Kerjanya. Pendataan yang biasa dilakukan dengan kunjungan rumah (keluarga) ini harus dilakukan secara terjadwal dan rutin. Nantinya, Puskemas bisa memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (Family Folder) ini untuk intervensi masalah kesehatan yang ditemui.

Program PIS-PK atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Sehat adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran. Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.

Terdapat 12 indikator kesehatan yang dinilai pada program PIS-PK ini, indikator tersebut antara lain:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Indikator PIS-PK dapat dilakukan intervensi melalui kunjungan langsung atau edit data menggunakan data sekunder yang telah dimiliki UPT Puskesmas misalnya untuk data indikator Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, dan Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Selain melalui data sekunder juga dapat dibandingkan dengan data pada RME simpustronik yang ada di UPT Puskesmas untuk data hipertensi berobat teratur. Setiap intervensi yang dilakukan akan merubah capaian IKS yang dapat dilihat melalui aplikasi

jatim-keluargasehat akan tetapi karena aplikasi tidak update dari awal Tahun 2023, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar mengupayakan adanya pengolahan data secara manual dengan KS final. Oleh karena itu, setelah dilaksanakannya intervensi pada triwulan III maka perlu dilakukan olahan data KS final di triwulan III untuk mengetahui progress IKS serta perlu dilakukan moneyv sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan data per-31 Desember 2025 sebesar 0,85 melebihi dari target daerah 0,81, yaitu dengan capaian 104,94% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Kota Blitar termasuk dalam kategori “**keluarga sehat**” dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83	54,49	61,20	91,63	98,63
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14	99,10	98,95	100	100
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26	99,28	99,27	99,40	100
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02	91,12	91,93	99,42	100
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25	97,51	97,49	100	100
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02	44,02	64,65	86,65	87,60
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81	37,23	39,72	76,95	82,29
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88	60,00	65,15	88,58	96,33
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44	59,98	61,42	80,65	85,33

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12	65,52	73,06	100	99,84
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43	98,98	99,05	99,66	99,60
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22	98,63	98,77	99,68	99,73
Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar		0,28	0,35	0,41	0,79	0,85

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2025 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,57. IKS Kota Blitar telah mencapai kenaikan menjadi 0,85 (Sehat). Capaian indikator yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur (82,29%)

Indikator tersebut masih bercampur antara benar-benar penderita hipertensi atau masih probable hipertensi. Oleh karena itu perlu ditelusuri lagi untuk warga yang tidak menderita hipertensi tetapi tidak dilakukan pengukuran tekanan darah, perlu dilakukan intervensi untuk menginputkan data pengukuran tekanan darah dari hasil simpustronik ataupun dengan kunjungan keluarga. Sehingga diharapkan capaian keluarga dengan indikator hipertensi berobat teratur bisa meningkatkan capaian indikator.

Dalam pelaporan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain data intervensi tahun 2023 belum optimal terlapor pada aplikasi PIS-PK, sehingga diperlukan *back up* pendataan dengan tetap memberikan intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indikator IKS yang masih rendah.

Upaya tindak lanjut yang dipat dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

- Intervensi lanjutan berdasarkan data simpustronik

- Sinkronisasi data PIS-PK dengan data program
- Pengelolaan data secara manual menggunakan KS final untuk mengetahui *progress* intervensi

Sasaran 2 “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”, merupakan indikator penunjang administrasi perangkat daerah, yaitu:

h. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

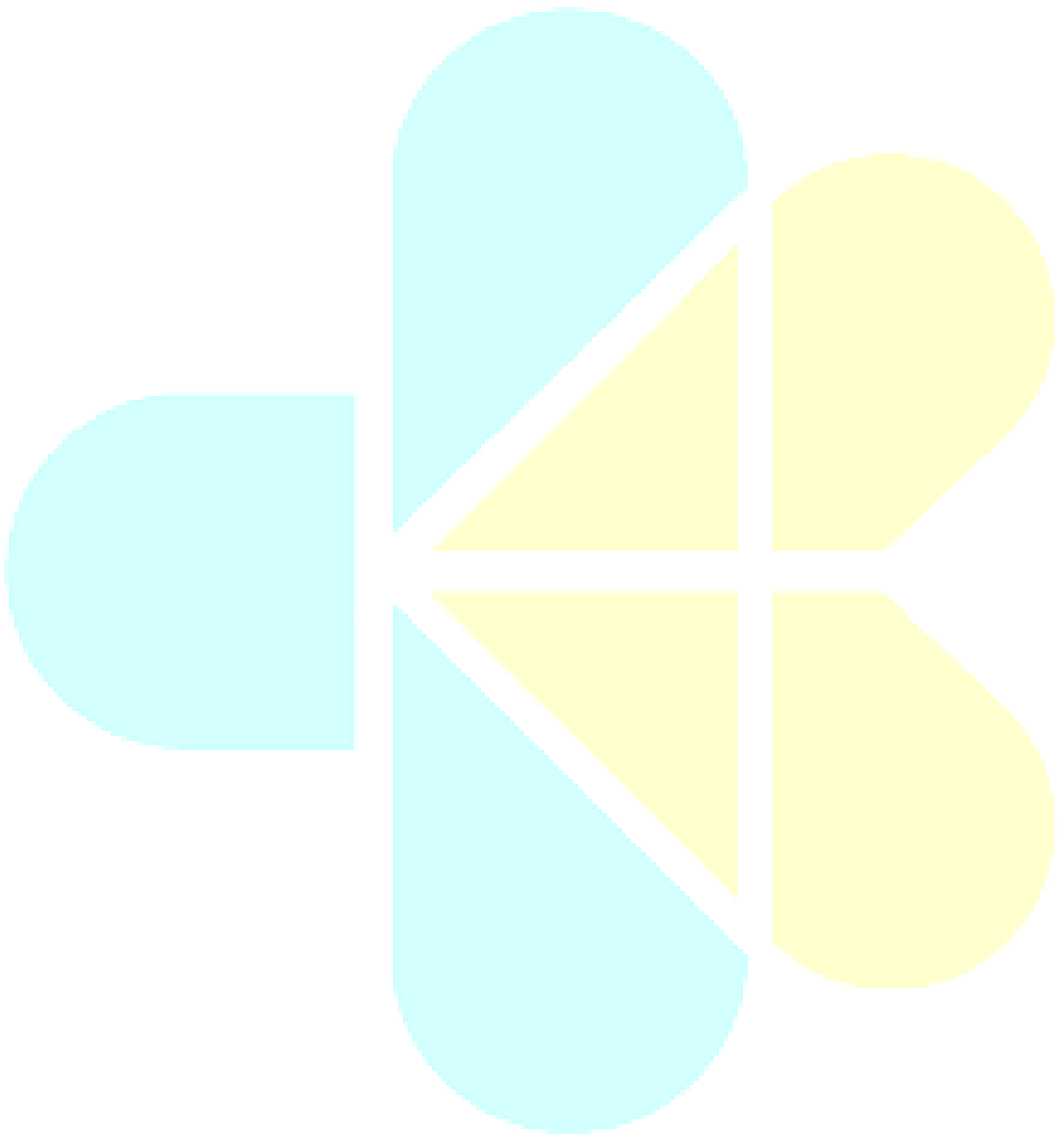
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah 85,65 termasuk dalam kategori A dari target A (86,36) maka capaiannya sebesar 99,18%.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memuat inovasi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan dalam dokumen renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029.
- Menetapkan target pada Perencanaan Kinerja dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.
- Melakukan identifikasi ulang renaksi kinerja untuk memastikan tercapainya target efisiensi dan efektivitas pada indikator Angka Kematian Ibu dan Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- Menyajikan dokumen pendukung penyajian informasi dalam laporan kinerja yang mencakup seluruh pegawai.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2023 – 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	5	6		8	9		11		12
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,26	74,27	75,3	74,97	75,20	75,47	100,96	101,25	100,23
A.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per 100.000 kelahiran hidup	98,14 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	173,99 per 100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	190,46	22,71	200
		Angka Kematian Bayi (AKB)	9,93 per 1.000 kelahiran hidup	9,09 per 1.000 kelahiran hidup	4,77 per 1.000 kelahiran hidup	4,77 per 1.000 kelahiran hidup	7,39 per 1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	151,96	118,70	127,43
		Prevalensi balita stunting	7%	6,95%	6,87%	7,64%	6,87%	6,18%	90,86	101,15	110,11
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,2%	46,1%	33,15%	30,9%	33,15%	37,66%	203,29	71,91	113,59
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	75%	85%	77,27%	76,92%	85,71%	118,88	102,56	100,84

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	N/A	84 (indeks)	86,78 (indeks)	N/A	86,78 (indeks)	90,30 (indeks)	N/A	103,31	104,06
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,60 (skala)	0,70 (skala)	0,81 (skala)	0,41 (skala)	0,79 (skala)	0,85 (skala)	68,33	112,86	104,94
2.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (85,08)	A (85,07)	A (85,65)	97,79	99,24	99,18
B.	<i>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</i>	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (85,08)	A (85,07)	A (85,65)	97,79	99,24	99,18

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 terhadap target periode akhir Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,30	75,47	101,57
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	0 per-100.000 kelahiran hidup	200
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	3,46 per-1.000 kelahiran hidup	159,34
	Prevalensi balita stunting	6,80%	6,18%	109,12
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30%	37,66%	125,53
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terakreditasi	100%	85,71%	85,71
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,85 (skala)	100
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,65)	98,45

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)

Indikator pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Indikator Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun 2025. Dalam rangka pencapaian target

renstra, Dinas Kesehatan didukung oleh pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan realisasi Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Daerah Tahun 2025	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	76,51%	100%	+
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84,59%	100%	+
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	83,75%	100%	+
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	75,32%	100%	+
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,28%	100%	+
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	17,14%	100%	+
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,01%	100%	+
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,16%	100%	+
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,42%	100%	+

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Daerah Tahun 2025	Ket.
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68,08%	100%	+
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	

*Keterangan : + realisasi daerah lebih besar dari realisasi provinsi
- realisasi daerah lebih kecil dari realisasi provinsi*

B. Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPT Puskesmas, yaitu UPT Puskesmas Kepanjenkidul, UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Sananwetan.

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis
Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja
Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	641.374.156,00	0,46
		Angka Kematian Balita (AKB)	162.964.000,00	0,12
		Prevalensi Balita Stunting	1.382.532.700,00	0,98
		Cakupan pelayanan kesehatan	48.539.824.127,00	34,50
		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	9.532.578.110,00	6,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	2.789.075.900,00	1,98
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	77.647.254.137,00	55,19
Jumlah			140.695.603.130,00	100

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
Dinas Kesehatan		134.527.380.735,00	131.599.450.498,83	97,82
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.098.169.573,00	51.158.561.965,83	96,35
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.780.969.060,00	5.708.169.319,00	98,74
	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000,00	498.500.000,00	99,70
	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	854.247.154,00	811.894.613,00	94,04
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	468.439.000,00	468.320.000,00	99,97
	4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	479.192.000,00	478.917.830,00	99,94
	5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.473.190.906,00	3.444.636.876,00	99,18
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	500.000,00	500.000,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	7. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	5.400.000,00	5.400.000,00	100
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.905.681.983,00	45.046.524.390,83	96,04
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.644.356,00	75.400.900,00	99,68
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	177.050.000,00	176.599.564,00	99,75
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	148.290.000,00	144.071.845,00	97,16
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.031.000,00	44.008.500,00	99,95
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	78.154.765,00	65.430.290,00	83,72
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	213.089.860,00	210.978.700,00	99,01
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.504.500,00	70.312.026,00	99,73
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.816.600,00	14.816.600,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.456.000,00	41.449.900,00	99,99
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	70.747.900,00	69.230.658,00	97,18
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	244.111.084,00	244.108.013,00	100
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	128.935.600,00	125.295.710,00	100
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.019.000,00	10.019.000,00	100
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.300.000,00	3.300.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.680.400,00	145.658.732,00	99,99
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	47.409.900,00	47.385.000,00	99,95
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	471.438.000,00	379.022.800,00	80,40
	18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	285.536.292,00	277.370.800,00	97,14
	19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.120.000,00	19.931.200,00	99,06
	20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	67.568.400,00	67.556.400,00	99,98
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14.517.561,00	13.143.000,00	90,53
	22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	503.490.750,00	503.450.050,00	99,99
	23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.702.212.048,00	31.346.592.700,00	95,85
	24. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	279.275.000,00	241.792.500,00	86,58
	25. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	199.810.300,00	193.601.724,00	96,89
	26. Operasional Pelayanan Puskesmas	9.657.385.816,00	9.437.288.404,83	97,72
	27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	492.706.180,00	446.512.143,00	90,62
	28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	429.542.715,00	381.922.088,00	88,91
	29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	38.392.500,00	38.381.300,00	99,97
	30. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	19.486.556,00	19.486.400,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	129.068.900,00	112.120.650,00	86,87
	32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	5.616.000,00	5.616.000,00	100
	33. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	76.274.000,00	74.670.793,00	97,90
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	290.500.000,00	286.345.000,00	98,57
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	290.500.000,00	286.345.000,00	98,57
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.018.530,00	117.523.256,00	92,41
	1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	8.124.530,00	5.085.000,00	62,59
	2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	112.894.000,00	112.438.256,00	99,60
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	711.361.400,00	684.566.914,00	96,23
	a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	24.004.200,00	21.240.998,00	88,49
	1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.004.200,00	21.240.998,00	88,49
	b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	130.454.200,00	124.605.230,00	95,52
	1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	21.629.000,00	20.520.000,00	94,87
	2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	108.825.200,00	104.085.230,00	95,64
	c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	556.903.000,00	538.720.686,00	96,74
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	556.903.000,00	538.720.686,00	96,74
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	319.434.225,00	311.787.144,00	97,61
	a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.552.700,00	55.967.164,00	98,96
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.552.700,00	55.967.164,00	98,96
	b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	100
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	100
	c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	177.524.000,00	171.774.980,00	96,76
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	177.524.000,00	171.774.980,00	96,76

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
d.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.970.400,00	40.720.000,00	99,39
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.970.400,00	40.720.000,00	99,39
e.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.148.950,00	19.148.500,00	100
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	19.148.950,00	19.148.500,00	100
f.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20.738.175,00	19.676.500,00	94,88
	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	20.738.175,00	19.676.500,00	94,88
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.751.161.400,00	2.636.750.905,00	95,84
a.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.458.105.600,00	2.345.290.905,00	95,41
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.458.105.600,00	2.345.290.905,00	95,41
c.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	293.055.800,00	291.490.000,00	99,47
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	293.055.800,00	291.490.000,00	99,47
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,92
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.185.524,00	58.856.500,00	99,44
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.306.600,00	20.306.600,00	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.878.924,00	38.549.900,00	99,15
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.739.978.718,00	72.124.332.400,00	99,15
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.736.953.718,00	72.121.417.400,00	99,15
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.025.000,00	2.915.000,00	96,36
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.279.100,00	189.577.200,00	95,61
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.076.000,00	22.877.100,00	99,14
	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.839.000,00	7.579.000,00	96,68
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	167.364.100,00	159.121.100,00	95,07
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.051.719,00	443.104.179,00	99,56
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.194.400,00	10.194.400,00	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.782.619,00	58.358.694,00	99,28
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.339.200,00	30.338.500,00	100
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.450.000,00	42.440.000,00	99,98

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.019.600,00	52.019.600,00	100
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.180.000,00	9.180.000,00	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	114.784.425,00	99,81
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	127.085.900,00	125.755.560,00	98,98
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	710.147.450,00	691.083.735,00	97,32
	1. Pengadaan Mebel	274.294.400,00	259.310.310,00	94,54
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	435.853.050,00	431.773.425,00	99,06
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.984.972.026,00	2.794.854.789,00	93,63
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	424.643.677,00	301.488.000,00	71,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.560.328.349,00	2.493.366.798,00	97,38
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.639.600,00	505.944.767,00	99,28
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.345.100,00	230.296.143,00	99,98
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.294.500,00	109.294.500,00	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000,00	166.354.124,00	97,86
	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	2.001.908.256,00	1.28.020.873,00	96,31
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.990.769.856,00	1.916.932.873,00	96,29
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	503.512.200,00	498.160.063,00	98,94
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	152.145.200,00	149.075.220,00	97,98
	2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.200.000,00	22.200.000,00	100
	3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	323.044.000,00	320.837.563,00	99,32
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	6.123.000,00	6.047.280,00	98,76
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.487.257.656,00	1.418.772.810,00	95,40
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.675.600,00	27.179.300,00	98,21
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.550.000,00	4.549.500,00	99,99
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	600.000,00	595.000,00	99,17
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.700.000,00	1.700.000,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.010.000,00	10.213.555,00	85,04
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	906.000,00	733.200,00	80,93
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.132.300,00	3.059.160,00	97,66
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.800.000,00	1.773.780,00	98,54
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.000.000,00	18.981.000,00	99,90

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.400.000,00	10.400.000,00	100
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.802.000,00	32.216.700,00	98,22
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.400.000,00	1.400.000,00	100
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302.043.200,00	280.173.091,00	92,76
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.400.000,00	9.400.000,00	100
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	43.849.000,00	41.152.044,00	93,85
16.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.628.000,00	18.689.500,00	95,22
17.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.411.000,00	48.504.600,00	96,22
18.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	845.600,00	686.100,00	81,14
19.	Operasional Pelayanan Puskesmas	67.122.000,00	64.022.475,00	95,38
20.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	808.347.156,00	773.852.654,00	95,73
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.561.000,00	12.550.000,00	99,91
22.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	55.070.800,00	55.050.500,00	99,96
c.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.400.000,00	1.400.000,00	99,96
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	604.000,00	490.650,00	81,23
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.138.400,00	11.088.000,00	99,55
a.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.138.400,00	11.088.000,00	99,55
1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.138.400,00	11.088.000,00	99,55
UPT Puskesmas Sukorejo		2.001.983.912,00	1.875.841.850,00	93,70
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.988.459.812,00	1.864.546.750,00	93,77
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	306.231.600,00	282.158.141,00	92,14
1.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.782.150,00	20.141.650,00	92,47
2.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	11.974.400,00	79,83
3.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	269.449.450,00	250.042.091,00	92,80
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.682.228.212,00	1.582.388.609,00	94,07
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.128.900,00	26.096.500,00	99,88
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.000.000,00	4.998.200,00	99,96
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.500.000,00	7.325.000,00	97,67
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.607.600,00	7.607.400,00	100
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.159.900,00	13.779.100,00	90,89
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.000.000,00	4.974.000,00	99,48

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.791.700,00	14.338.900,00	62,91
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.230.000,00	3.930.000,00	92,91
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	22.873.400,00	22.703.600,00	99,26
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	52.697.700,00	52.671.300,00	99,95
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36.225.000,00	33.000.000,00	91,10
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.410.000,00	4.410.000,00	100
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.736.000,00	218.174.400,00	94,56
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.027.800,00	11.027.800,00	100
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.534.312,00	28.875.000,00	97,77
16.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.167.000,00	17.166.800,00	100
17.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.070.000,00	23.960.000,00	99,54
18.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.050.100,00	84.859.590,00	97,48
19.	Operasional Pelayanan Puskesmas	958.181.200,00	888.932.319,00	92,77
20.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.754.900,00	10.604.900,00	98,61
21.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30.000.000,00	30.000.000,00	100
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	69.362.700,00	69.316.300,00	99,93
23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	4.720.000,00	3.637.500,00	77,07
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.524.100,00	11.295.100,00	83,52
	a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.524.100,00	11.295.100,00	83,52
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.524.100,00	11.295.100,00	83,52
	UPT Puskesmas Sananwetan	2.164.330.227,00	2.094.889.624,00	96,79
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.151.078.227,00	2.081.870.544,00	96,78
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	396.631.400,00	384.967.437,00	97,06
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.121.700,00	9.031.600,00	99,01
	2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.000.000,00	23.135.000,00	96,40
	3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	363.509.700,00	352.800.837,00	97,05
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.754.446.827,00	1.696.903.107,00	96,72
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.050.000,00	62.050.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.375.000,00	4.375.000,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.574.000,00	6.574.000,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.824.800,00	24.824.800,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.191.000,00	26.191.000,00	100
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150.000,00	120.000,00	80
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.925.000,00	5.925.000,00	100
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.380.000,00	1.380.000,00	100
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.800.000,00	2.800.000,00	100
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.187.200,00	3.003.500,00	94,24
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.150.000,00	38.150.000,00	100
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.850.000,00	2.790.000,00	97,89
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	625.909.500,00	595.133.500,00	95,08
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.260.000,00	17.260.000,00	100
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.984.600,00	14.922.624,00	87,86
16.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.327.000,00	9.304.000,00	99,75
17.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	81.224.000,00	79.350.842,00	97,69
18.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.366.000,00	105.204.289,00	95,32
19.	Operasional Pelayanan Puskesmas	639.679.727,00	662.836.052,00	97,37
20.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.166.000,00	7.762.800,00	95,06
21.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	100
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	51.650.000,00	51.650.000,00	100
23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	422.800,00	295.700,00	69,94
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.252.000,00	13.019.080,00	98,24
a.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.252.000,00	13.019.080,00	98,24
1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.252.000,00	13.019.080,00	98,24
JUMLAH TOTAL DINAS KESEHATAN		140.695.603.130,00	137.498.202.845,83	97,73

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 137.498.202.845,83** dari total anggaran sebesar **Rp. 140.695.503.130,00** atau sebesar **97,73%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 termasuk **“sangat berhasil”**.

Secara umum kinerja keuangan per program sudah baik, ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak optimal pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan realisasi sebesar 62,59% dikarenakan honorarium narasumber tidak terserap secara optimal. Sebagai upaya tindak lanjut yaitu koordinasi lebih lanjut terkait kebutuhan narasumber pada aktivitas pertemuan yang melibatkan narasumber dari luar daerah.

Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut:

Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	100%	100	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	100%	100	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	100%	100	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100	
Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100	
Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100	

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100	
Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%	84,62%	120,89	Dari 13 indikator penyehatan lingkungan 11 indikator sudah memenuhi syarat
Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	77,78%	43,59%	56,04	Terdapat 3 Pos UKK yang telah berhenti beroperasi dikarenakan pengusaha sudah tidak memproduksi lagi dan beralih usaha yang lain
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100	

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
Minuman

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100
Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	93,72%	93,72%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	100%

Program Non Urusan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,52	90,06%	99,49%

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
A. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	200%	641.374.156,00	637.269.757,00	99,36%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	100%	100%	641.374.156,00	637.269.757,00	99,36%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	100%	100%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,77 per 1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	127,43%	162.964.000,00	158.565.845,00	97,30%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	100%	100%	162.964.000,00	158.565.845,00	97,30%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Prevalensi balita stunting	6,87%	6,18%	110,11%	1.382.532.700,00	1.317.280.424,00	95,28%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	99,67%	99,67%	1.382.532.700,00	1.317.280.424,00	95,28%
	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	37,66%	113,59%	48.539.824.127,00	46.640.069.109,83	96,09%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	48.539.824.127,00	46.640.069.109,83	96,09%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%			
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%			
	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%			
	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%	84,62%	120,89%			
	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	77,78%	43,59%	56,04%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	85,71%	100,84%	9.532.578.110,00	9.265.081.055,00	97,19%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 (indeks)	90,30 (indeks)	104,06%			
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	8.501.782.485,00	8.268.726.997,00	97,26%
2. Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	711.361.400,00	684.566.914,00	96,23%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%	319.434.225,00	311.787.144,00	97,61%
	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	92,03%	99,31%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,81	0,85	104,94%	2.751.161.400,00	2.636.780.905,00	95,84%
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	100%	2.751.161.400,00	2.636.780.905,00	95,84%
B. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18%	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,92%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,52	90,06	99,49%	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,92%
Total					140.695.603.130,00	137.498.202.845,83	97,73%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	123,00	96,26	1,28	Efisien
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	99,18	98,92	1,00	Efisien

Tingkat efisien capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 pada kedua sasaran Dinas Kesehatan mengalami efisiensi. Pada sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terdapat 6 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 123,0% sehingga dengan penyerapan sebesar 96,26% mengalami kondisi efisiensi. Berlaku juga terhadap sasaran 2 Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan 1 indikator kinerja dengan capaian lebih besar daripada capaian penyerapan anggaran.

C. Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2025, ada 2 (dua) penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu:

1. Penghargaan Puskesmas Sananwetan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas Terbaik III Wahana Program Internsip Dokter Tahun 2025.

2. Peran serta Dinas Kesehatan dalam peraihan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori **Nindya**

Kota Layak Anak merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak, hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak.

Penghargaan KLA ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA). Sedangkan untuk kategori KLA ini ada 5 (lima) yaitu :

- a. Kategori Pratama
- b. Kategori Madya
- c. Kategori Nindya
- d. Kategori Utama
- e. Kategori KLA

Kriteria penilaian evaluasi KLA ini meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Hak sipil dan kebebasan
- c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- d. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- e. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- f. Hak perlindungan khusus

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	200%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,77 per 1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	127,43%
	Prevalensi balita stunting	6,87%	6,18%	110,11%
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	37,66%	113,59
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	85,71%	100,84
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 (indeks)	90,03 (indeks)	104,06
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,81 (skala)	0,85 (skala)	104,94

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18
Rata-rata capaian kinerja				120,02%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 120,02% atau **"sangat berhasil"**.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 kelahiran hidup	200%	641.374.156,00	637.269.757,00	99,36%
Angka Kematian Bayi (AKB)	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	3,46 per 1.000 kelahiran hidup	127,43%	162.964.000,00	158.565.845,00	97,30%
Prevalensi balita stunting	6,87%	6,18%	110,11%	1.382.532.700,00	1.317.280.424,00	95,28%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	37,66%	113,59%	48.539.824.127,00	46.640.069.109,83	96,09%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	85,71%	100,84%	9.532.578.110,00	9.265.087.055,00	97,19%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 (indeks)	90,30 (indeks)	104,06%			

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,81 (skala)	0,85 (skala)	104,94%	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00	95,81%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18%	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,26%
Total				140.695.603.130,00	137.498.202.845,83	97,73%

Akuntabilitas kinerja tinggi dengan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator sasaran mencapai target. Adapun 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **97,73%** dikategorikan "**sangat berhasil**", seperti pada tabel di bawah ini, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1.	Mempertahankan tidak ada kematian bayi	Melaksanakan audit kasus kematian maternal dan perinatal (AMP-SR)	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		Melaksanakan kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu nifas beresiko	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	√		
		Melaksanakan supervisi fasilitatif dalam rangka monitoring pelayanan program KIA dan hasil pendampingan di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Blitar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	√		
		Melaksanakan pendampingan tim ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas se-Kota Blitar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		Melaksanakan kegiatan On The Job Training (OJT) kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan FKTP	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	√		
		Melaksanakan pertemuan dalam rangka evaluasi Puskesmas dan RS dalam pencegahan dan penanganan penyebab utama kematian ibu dan bayi, sebagai bentuk upaya meningkatkan kerja sama antar jejaring/jaringan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	√		
2.	Mengurangi jumlah kematian bayi	Melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan bayi Resti	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		
		Melaksanakan pendampingan dr. Sp.A wilayah bagi FKTP se-Kota Blitar	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Melaksanakan OJT Kegawatdaruratan bagi tim kegawatdaruratan FKTP ke RS Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	√		
		Melanjutkan Skrining pada bayi baru lahir (SHK, HAK, G6PD, PJB dan atresia bilier)	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		
3.	Menurunkan prevalensi balita stunting	Evaluasi pelaksanaan penimbangan di posyandu dengan memperhatikan alat antropometri dan kemampuan kader dalam melakukan pengukuran	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat			
		Verifikasi ulang oleh tenaga kesehatan bila ditemukan selisih data yang tinggi	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	√		
		Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas serta melakukan analisa permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	√		
		Monitoring dan evaluasi pencegahan stunting di tingkat kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat			
4.	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	Evaluasi pemakaian RME di TPMD dan klinik di Kota Blitar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	√		
		Memfasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan ke Dinas Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	√		
		Pengembangan dashboard data di Dinkes Kota Blitar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	√		
5.	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Mengingatkan proses reakreditasi kepada 4 Rumah Sakit yang akan habis masa berlaku sertifikat akreditasinya pada tahun 2026	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
		Melaksanakan feedback perencanaan perbaikan strategis (PPS) pada setiap fasyankes yang telah melaksanakan akreditasi	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	√		
		Mendorong klinik dan laboratorium yang belum melaksanakan akreditasi sampai tahun 2025	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	√		
6.	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan di UPT Puskesmas	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas			
7.	Meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Intervensi lanjutan berdasarkan data simpustronik	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas	√		
		Sinkronisasi data PIS-PK dengan data program	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas	√		
		Pengelolaan data secara manual menggunakan KS final untuk mengetahui progress intervensi	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas	√		

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI

Pembina

NIP. 197507212006042016

**MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	74,29 tahun	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali Konstanta (100.000) bayi lahir hidup	189,13 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per 100.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	a. peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan b. peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan c. peningkatan kunjungan K1 dan K4	
						Angka kematian Bayi (AKB)	Jumlah Kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	11,82 per-1.000 kelahiran hidup	8,98 per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	a. Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) c. Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) d. peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang	
						Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7,25%	6,90%	Peningkatan penanganan stunting	a. Pemenuhan gizi ibu hamil b. Peningkatan gizi balita	
						Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	NA	29%	Peningkatan pelayanan kesehatan	a. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan b. Peningkatan sistem pelayanan rujukan c. Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit d. Peningkatan layanan kegawatdaruratan e. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan f. Pengembangan layanan <i>home care</i>	
										Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	a. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular b. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS	
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%		85%	Peningkatan akreditasi fasyankes	a. Peningkatan pembinaan akreditasi fasyankes b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	
						IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%		0,80 (skala)	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan di fasilitas pelayanan	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar		A (86,36)	Meningkat-nya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A (86,36)	Peningkatan kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan sarana prasarana perkantoran b. Peningkatan koordinasi antar bidang dan lintas sektor	

Blitar, 3 Februari 2026
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI
NIP 197507212006042016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

TUJUAN : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR : Angka Harapan Hidup (AHH)

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2326 orang	75.644.356	DINKES
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	670 orang	27.675.600	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	786 orang	26.128.900	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	870 orang	62.050.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	76.274.000	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	1.400.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	4.720.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	422.800	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN																		
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	55.070.800	UPT Puskesmas Kepanjenkidul														
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	69.362.700	UPT Puskesmas Sukorejo														
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 dokumen	51.650.000	UPT Puskesmas Sananwetan														
										Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2326 orang	177.050.000	Dinkes									
																Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	670 orang	4.550.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul									
																Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	786 orang	5.000.000	UPT Puskesmas Sukorejo									
																Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	870 orang	4.375.000	UPT Puskesmas Sananwetan									
																Angka kematian Bayi (AKB)	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2167 orang	148.290.000	Dinkes
																									Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	621 bayi	600.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN										
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	738 orang	7.500.000	UPT Puskesmas Sukorejo						
											Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	808 orang	6.574.000	UPT Puskesmas Sananwetan						
		Prevalensi balita stunting	6,87%		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8674 orang	44.031.000	Dinkes						
											Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.484 orang	1.700.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul						
											Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.954 orang	7.607.600	UPT Puskesmas Sukorejo						
											Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3236 orang	24.825.000	UPT Puskesmas Sananwetan						
											Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen	145.680.400	Dinkes
																	Jumlah dokumentasi intervensi Gizi sensitif	3 fasilitasi	302.043.200	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
																	Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%	230.736.000	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN										
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	625.909.500	UPT Puskesmas Sananwetan						
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	33,15%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.973 orang	78.154.765	Dinkes						
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.803 orang	12.010.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul						
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.450 orang	15.159.900	UPT Puskesmas Sukorejo						
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.720 orang	26.191.000	UPT Puskesmas Sananwetan						
											Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.742 orang	213.089.860	Dinkes
																	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28.855 orang	906.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
																	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.309 orang	5.000.000	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37.578 orang	150.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.714 orang	70.504.500	Dinkes
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.510 orang	3.132.300	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.730 orang	22.791.700	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.474 orang	5.925.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 dokumen	604.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.876 orang	14.816.600	Dinkes
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.829 orang	1.800.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.363 orang	4.230.000	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.684 orang	1.380.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.231 orang	41.456.000	Dinkes
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.238 orang	19.000.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.471 orang	22.873.400	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.612 orang	2.800.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	297 orang	70.747.900	Dinkes
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	85 orang	10.400.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	101 orang	52.697.700	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	111 orang	3.187.200	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	284 orang	845.600	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 orang	14.517.561	Dinkes
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2.829 orang	244.111.084	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	971 orang	32.802.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	688 orang	36.225.000	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.170 orang	38.150.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43 orang	30.000.000,00	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79 orang	15.000.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.434 orang	128.935.600	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.210 orang	1.400.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.059 orang	4.410.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.165 orang	2.850.000	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18 dokumen	32.702.212.048	Dinkes			
								Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%								
								Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas						48 dokumen	9.657.385.816	Dinkes
									Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas						2 dokumen	808.347.156	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
									Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas						12 dokumen	958.181.200	UPT Puskesmas Sukorejo
									Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas						12 dokumen	639.679.727	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100%	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 laporan	38.392.500	Dinkes			
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 dokumen	10.019.000	Dinkes			
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	67.568.400	Dinkes			
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	50.411.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	24.070.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	81.224.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	503.490.750	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	67.122.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	87.050.100	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	110.366.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	163 paket	279.275.000	Dinkes
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 dokumen	19.486.556	Dinkes
										Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 orang	5.616.000	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 dokumen	3.300.000	Dinkes
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	99,09%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 dokumen	471.438.000	Dinkes
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	100%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	43.849.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul		
						Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	29.534.312	UPT Puskesmas Sukorejo		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		12 dokumen	16.984.600	UPT Puskesmas Sananwetan			
						Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	Penyelenggara an Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 dokumen	199.810.300	Dinkes		
						Persentase program prioritas yang dipromosikan	100%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	285.536.292	Dinkes		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	19.628.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul			
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	17.167.000	UPT Puskesmas Sukorejo			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	9.327.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	77,78%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pos UKK yang terbina	6 Pos UKK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	3 dokumen	47.409.900	Dinkes
								Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	75%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	9.400.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	66,67%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	11.027.800	UPT Puskesmas Sukorejo
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen		17.260.000	UPT Puskesmas Sananwetan		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	100%	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	8 dokumen	492.706.180	Dinkes	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,78 indeks								Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen	12.561.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	
										Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen	10.754.900	UPT Puskesmas Sukorejo	
										Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 dokumen	8.166.000	UPT Puskesmas Sananwetan	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN																	
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
										Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	13 unit	429.542.715	Dinkes													
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	20,42%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 dokumen	20.120.000	Dinkes													
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	129.068.900	Dinkes													
																				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	500.000.000	Dinkes
																				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 unit	854.247.154	Dinkes			
																				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 unit	468.439.000	Dinkes			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	55 unit	152.145.200	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	44 unit	21.782.150	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	30 unit	9.121.700	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	300 unit	479.192.000	Dinkes
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	8 unit	22.200.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	4 unit	15.000.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	24 unit	24.000.000	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2.841 keluarga	500.000	Dinkes		
										Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	57 keluarga	6.123.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul			
										Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	6 paket	3.473.190.906	Dinkes
										Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	3 paket	323.044.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul			
										Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	4 paket	269.449.450	UPT Puskesmas Sukorejo			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	10 paket	363.509.700	UPT Puskesmas Sananwetan
										Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	12 paket	5.400.000	Dinkes
										Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	290.500.000	Dinkes
										Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	8.124.530	Dinkes
										Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	5 dokumen	112.894.000	Dinkes
										PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	24.004.200	Dinkes
							Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	500 dokumen		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	500 orang	21.629.000	Dinkes
										Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 dokumen	108.825.200	Dinkes
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	19%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	68 orang	556.903.000	Dinkes
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kes., dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 dokumen	56.552.700	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	4.500.000	Dinkes
					Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang berizin	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 dokumen	177.524.000	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga, rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	92,67%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	1 dokumen	40.970.400	Dinkes
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	19.148.950	Dinkes
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	100%	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	50 unit	20.738.175	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,81 (skala)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	60,2%	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	2.458.105.600	Dinkes
								Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	100%					
								Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	100%					
								Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM					
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	293.055.800	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,52 (Indeks)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	20.306.600	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 laporan	38.878.924	Dinkes
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	902 orang/bulan	72.736.953.718	Dinkes
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	3.025.000	Dinkes
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	23.076.000	Dinkes
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 dokumen	7.839.000	Dinkes
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 orang	167.364.100	Dinkes
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.194.400	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	58.782.619	Dinkes
										Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	30.339.200	Dinkes
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	42.450.000	Dinkes
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	52.019.600	Dinkes
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	9.180.000	Dinkes
										Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	115.000.000	Dinkes
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	127.085.900	Dinkes
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	121 unit	274.294.400	Dinkes
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	80 unit	435.853.050	Dinkes
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	424.643.677	Dinkes
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	2.560.328.349	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	230.345.100	Dinkes
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	208 unit	109.294.500	Dinkes
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	170.000.000	Dinkes
JUMLAH PAGU ANGGARAN													140.695.603.130	

Blitar, 3 Februari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI
NIP 197507212006042016

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
Kota Blitar,

dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI
Pembina (IV/a)
NIP. 197507212006042016

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	47.68(Per-100.00)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4.77(Per-1.000)
		Prevalensi balita stunting	6.87(Persen)
		Cakupan pelayanan kesehatan	33.15(Persen)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	85.00(Persen)
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.81(Skala)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86.78(Indeks)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	86.36(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,789,075,900.00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditent
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	319,434,225.00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan, Dana Alokasi Umum (DAU)
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	711,361,400.00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59,228,477,468.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum (DAU), DA
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77,647,254,137.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
Total:		140,695,603,130.00	


 Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Pt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
 Kota Blitar,

dr. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197507212006042016

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	0 per-100.000 kelahiran hidup	200		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	641.374.156,00	637.269.757,00	99,36%	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	3,46 per-1.000 kelahiran hidup	127,43		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	162.964.000,00	158.565.845,00	97,30%	
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	6,87%	6,18%	110,11		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.382.532.700,00	1.317.280.424,00	95,28%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	33,15%	37,66%	113,59		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	48.539.824.127,00	46.640.069.109,83	96,09%	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	85%	85,71%	100,84		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.501.782.485,00	8.268.726.997,00	97,26%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Blitar	86,78 (indeks)	90,30 (indeks)	104,06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	711.361.400,00	684.566.914,00	96,23%	
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00	97,61%	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,81 (skala)	0,85 (skala)	104,94		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.751.161.400,00	2.636.780.905,00	95,84%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (86,36)	A (85,65)	99,18		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.647.254.137,00	76.807.753.570,00	98,92%	

Blitar, 3 Februari 2026
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA BLITAR



d. DISSIE LAKSMONOWATI ARLINI
 NIP. 197507212006042016



Dinas Kesehatan Kota Blitar 2026

Jalan S. Supriyadi No.61, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, 66133